

Sistem Informasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas



PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
ANGKATAN V TAHUN 2021

PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA SAMARINDA 2021





LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKSI PERUBAHAN SISTEM INFORMASI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS "SIPEMDA"

Disetujui untuk diseminarkan Pada Hari Kamis, Tanggal 25 November 2021

PESERTA

Nama : Paisal, ST

NDH : 30

NIP : 197601022002121007

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Instansi : Sekretariat DPRD Kota Bontang

Pada Seminar Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V 2021 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bontang bekerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, Samarinda

Mentor,

<u>Dra H) Asnaniah</u> NIP. 196906112000032005 Coach,

Veronika Hanna Naibaho NIP. 198009262006042004







LEMBAR PERSETUJUAN



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AKSI PERUBAHAN SISTEM INFORMASI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS "SIPEMDA"

Disusun Oleh:

Nama : Paisal, ST

NDH : 30

NIP : 197601022002121007

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Instansi : Sekretariat DPRD Kota Bontang

TELAH DIUJIKAN

Pada Seminar Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V 2021 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bontang bekerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, Samarinda

Hari Kamis, Tanggal 25 November 2021

Narasumber,

Dr. H. Fitriansyah, ST, MM

NIP. 197311272006041009

Coach,

Veronika Hanna Naibaho

NIP. 198009262006042004









LEMBAR KOMITMEN



PEMERINTAH KOTA BONTANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JALAN BESSAI BERINTA KELURAHAN BONTANG LESTARI BONTANG-KALTIM
Telp. (0548) 5135950 - 5135951 Faks. (0548) 21792 – 20463 email : setwankotabontang@g.mail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mentor : Dra. Hj. Asnaniah

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan Instansi : Sekretariat DPRD Kota Bontang

Adalah Mentor dari Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, atas nama :

Nama Peserta : Paisal, ST

Jabatan : Kasubag. Umum Dan Kepegawaian Instansi : Sekretariat DPRD Kota Bontang

Dengan ini kami menyatakan siap mendukung keberlanjutan Implementasi Aksi Perubahan dalam jangka panjang

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Bontang, 27 September 2021

Mengetahui,

Paisal, ST

Dra. Hj. Asnaniah









KATA **PENGANTAR**

Harapan dari reformer semoga pelatihan kepemimpinan pengawas ini dapat memberikan manfaat dan nilai tambah baik bagi reformer sendiri maupun bagi pembaca pada umumnya serta bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan Nya sehingga reformer dapat menyelesaikan Laporan Akhir Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V Tahun 2021 Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KDOD LAN) Samarinda, yang dilaksanakan sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021.

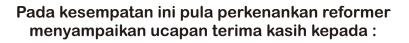
Aksi Perubahan ini dilaksanakan untuk mendorong Inovasi Aparatur Sipil Negara agar mampu berfikir kreatif dan menciptakan suatu Reformasi Birokrasi untuk mencapai good Government menuju Indonesia Tangguh.

Reformer menyadari bahwa dalam penulisan Aksi Perubahan ini masih banyak kekurangan maupun

> kelemahan baik secara substansi maupun kualitas penyajian, untuk itu Kritik dan saran yang

> > bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan Aksi Perubahan ini.

Dengan terselesaikan penulisan Aksi Perubahan ini, dengan segala kerendahan hati dan dari lubuk hati yang paling dalam reformer mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam mendukung proses Aksi Perubahan ini, sehingga dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.





- 2. Sekretaris Daerah Kota Bontang
- 3. Bapak H. Lukman, SS, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang yang telah mendukung dan memberi arahan dalam Aksi Perubahan ini.
- 4. Ibu Dra. Hj. Asnaniah selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bontang yang telah memberikan saran, bimbingan dan dukungan kepada reformer serta bertindak sebagai Mentor dalam Aksi Perubahan ini.
- 5. Ibu Veronika Hanna Naibaho, SS, M.Ap, M.Sc selaku Coach yang selalu membimbing, mengarahkan dan memberikan gagasan dalam penyusunan laporan ini.
- 6. Rekan rekan Tim Efektif yang telah bekerja keras dalam membantu reformer pada kegiatan implementasi aksi perubahan ini.
- 7. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang sebagai Stakeholder yang mendukung dalam mewujudkan aksi perubahan ini.





Daftar isi



≺ Lembar persetujuan

Lembar Komitmen Keberlanjutan Akper

**

Kata Pengantar

€ Daftar Isi

,

Ringkasan AKPER

vi

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

- 01 Pendahuluan
- 08 Profil Kinerja Pelayanan
- 13 Analisa Masalah Pelayanan
- 15 Strategi Penyelesaian Masalah

IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

- 20 Implementasi Sesuai Milestone Aksi Perubahan
- 30 Deskripsi Proses Kepemimpinan
- 32 Deskripsi Manfaat Aksi Perubahan
- 33 Deskripsi Keberlanjutan Aksi Perubahan
- 34 Publikasi
- 39 Analisa Perubahan Stakeholder
- 40 Dukungan

LAMPIRAN

- Kartu Pembimbingan Coach
- Kartu Pembimbingan Mentor

PENUTUP

42 Kesimpulan dan Saran









SISTEM INFORMASI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS



RINGKASAN SIPENDA

(SISTEM INFORMASI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS)



PAISAL, ST

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG

Aplikasi Sistem Informasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas (SIPEMDA) adalah aplikasi yang merupakan fasilitas untuk menyimpan data base. Aplikasi SIPEMDA pada dasarnya akan memudahkan Petugas dan Penyedia untuk melakukan koordinasi, hal ini juga dapat mendukung program pemerintah yang saat ini focus dalam penanganan covid-19 yang dalam kebijakan pemerintah Kota Bontang menetapkan adanya PFM, dimana adanya pembatasan masyarakat dalam beraktifitas.

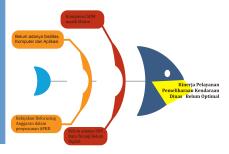
LATAR BELAKANG

MASALAH

ANALISA MASALAH

- Adanya pemegang kendaraan yang sering mengantar kendaraannya langsung kebengkel dan tidak melakukan koordinasi dengan petugas dan persetujuan pimpinan
- Adanya jumlah tagihan pemeliharaan kendaraan selalu melebihi anggaran yang tersedia
- Tahun 2019 , Adanya Catatan dan Evaluasi dari Tim Auditor
- Tahun 2020 , Hasil survey IKM Sekretariat DPRD Kota Bontang, khususnya Pelayanan Sarpras, Mendapatkan Nilai "C"

Untuk menganalisa dari permasalahan tersebut, maka dilakukan analisis penyebab masalah melalui analisis tulang ikan (fishbone analysis),



Desain pemeliharaan kendaraan dinas

Tujuan Utama yang akan dicapai :

- 1.Mengoptimalkan kinerja pelayanan pemeliharaan kendaraan dinas (Jangka Pendek)
- Memberikan kemudahan kepada pemegang kendaraan dinas dal melaksanakan administrasi pelayanan pemeliharaan (Jangka
 ...
 ...
- 3. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Pengelolaan dan Barang Milik Daerah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel (Jangka Panjang)

INTERNAL.

- Tersedianya database pemeliharaan kendaraan yang akuntabel
- Terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan mudah
- Terwujudnya Standar Operasional Prosedur secara maksimal
- Mengurangi Penggunaan Kertas (Paperless)

MANFAAT

TUJUAN

- **EKSTERNAL** Memudahkan pelayanan dan koordinasi
 - Memudahkan Pihak Memudahkan Pinak Ketiga (Bengkel)/Penyedia dalam menyediakan jasa pelayanan dan penagihan/invoice
- Mendapatkan kepastian waktu penyelesaian pekerjaan

MILESTONE



Merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan aksi perubahan pada Tanggal 27 September 2021, vaitu dengan membentuk Tim Efektif.







Melakukan koordinasi dengan Mentor terkait pembuatan aplikasi Sistem Informasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas



Merupakan tahapan Penyusunan Desain Aplikasi SIPEMDA pada Tanggal 05 Oktober







Ujicoba Aplikasi SIPEMDA yang dilakukan TIM IT, dan disaksikan oleh Sponsor dan Mentor, ujicoba ini dilaksanakan pada tanggal, 11 Nopember 2021





Merupakan tahapan pelaksanaan aksi perubahan dengan kegiatan Pelaksanaan Launching dan Sosialisasi Sistem Informasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas (SIPEMDA) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2021.











12 Nopember 2021.

Keglatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kota Bontang, Keglatan Launching dan Sosialisasi ini diawali dengan simulasi Aplikasi Sipemda yang dilakukan Reformer dan tim IT kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan sosialisasi kepada seluruh peserta agar dapat membahani dan mengerti panduan penggunaan sistem aplikasi yang nantinya dapat memberikan pemahaman kepada Stakeholder kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Sekretaris DPRD Kota Bontang selaku Sponsor sekaligus melaunching SIPEMDA.

penyusunan buku panduan sistem informasi pemeliharaan kendaraan dinas pada 11 Nopember 2021

No	Milestone	Keglatan	waktu	output
	Implementasi SIPEMDA untuk pemelihaman Barang Milik Daerah	Kerjasama dengan Pihak Jasa lainnya	Januari 2023	Dokumen Kontrak

MILESTONE JANGKA PANJANG **TAHUN 2023**

menyusun Standar Operasional Prosedur pada 11 Nopember 2021.

Perbaikan Aplikasi SIPEMDA yang dilakukan TIM IT, dilaksanakan pada tanggal, 11 Nopember 2021

REFORMER MENYAMPAIKAN

BEBERAPA HAL UNTUK KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

- Adanya dukungan dan komitmen Walikota, bersama Ketua DPRD Kota Bontang, dan kepala SKPD dalam mengimplementasikan SIPEMDA ini.
- Dalam pengembangan aplikasi SIPEMDA dapat dialokasikan dana pada tahun 2022
- Setelah launching aplikasi ini dan dapat diterima oleh petugas pemeliharaan , pimpinan serta vendor /pelaku usaha untuk dapat digunakan.
- Kendala yang dihadapai dalam menyelesaikan jangka pendek, akan menjadi evaluasi dalam pengembangan SIPEMDA.



JANGKA MENENGAH







RANCANGAN AKSI PERUBAHAN



A. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Latar Belakang Masalah Dalam setiap penggunaan kendaraan Dinas, untuk lebih mengoptimalkan kinerja kendaraan maka dalam prosesnya dibutuhkan suatu jenis Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, sehingga dalam sistem yang berjalan kini masih terdapat kekurangan antara lain penginputan data pemeliharaan dan suku cadang ke dalam form pemeliharaan yang dilakukan secara manual setelah dilakukan pemeriksaan kendaraan oleh petugas dan diverifikasi oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian selanjutnya mendapatkan persetujuan dari pimpinan dalam hal ini Sekretaris DPRD, dan selanjutnya form pemeliharaan diserahkan ke Bengkel dan selanjutnya kendaraan tersebut dilakukan perbaikan, setelah selesai perbaikan maka pemegang kendaraan mengambil kendaraan tersebut, selanjutnya pihak bengkel melakukan penagihan atau invoice dan tagihan diterima setelah dilakukan verifikasi oleh petugas namun sering terjadi perselisihan antara data dari bengkel dan petugas pemeliharaan sehingga dapat memperlambat target pencairan, ini disebabkan karna:

- Adanya pemegang kendaraan yang sering mengantar kendaraannya langsung kebengkel dan tidak melakukan koordinasi dengan petugas dan persetujuan pimpinan
 - Tahun 2019 , Adanya Catatan dan Evaluasi dari Tim Auditor
- Adanya jumlah tagihan pemeliharaan kendaraan selalu melebihi anggaran yang tersedia
- Tahun 2020 , Hasil survey IKM Sekretariat DPRD Kota Bontang, khususnya Pelayanan Sarpras, Mendapatkan Nilai "C"





LATAR BELAKANG MASALAH

Data Anggaran pemeliharaan kendaraan berdasarkan Tahun Anggaran APBD 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pemeliharaan Kendaraan	177.250.000
	Dinas Operasional	
2	Pemeliharaan Mobil	136.290.000
	Jabatan	
	Total	313.540.000

Data Tagihan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Januari – Agustus 2021

No	Anggaran	Uraian	Data yang Terinput	Data Tagihan	Selisih
	(Rp.)		(Rp)	(Rp.)	Rp.
1		Realisasi			
		Bulan Januari	94.739.700	94.739.700	0
		s/d Maret	94./39./00	94./39./00	0
	177.250.000	(Rp)			
2		Target			
		Realisasi	100 240 000	110 612 000	11 265 000
		Bulan April	108.248.000	119.613.000	11.365.000
		s/d Juli (Rp)			
			202.987.700	214.352.700	





LATAR BELAKANG MASALAH

Dengan data tagihan yang selisih dengan data dengan petugas tersebut diatas disebabkan karna adanya pemegang kendaraan pada saat pemeliharaan tidak melakukan koordinasi dengan petugas, sebagai contoh nota tagihan yang tidak melalui petugas, yaitu kendaraan roda 4 dengan plat KT.193.D dengan tagihan Rp. 6.805.000 dan KT.1191.D dengan tagihan Rp. 4.560.000 total Rp. 11.365.000.

Tabel Perbedaan Dokumen

Dokumen Melalui Petugas





Dokumen Tidak Melalui Petugas

46tii N	ol NT	95
gry	NAMA BARANG HARGA	JUMEAH
	MASTER REAL	780000
	LIME PARKE	540 ccs
	Batt Joint	425000
	KEINDAY PLEN PPH	480000
	Edupas Reur Blic	42000
	TALANS AIR	355 000
H	BION CURE	1900000
	SEPLIT CHARGON	190000
	MINTAK REM	92008
	GATTO LINE STABILIZED	250000
	GATT MAIL JOINT	200 000
	- Master sen	300000
	TOWISOL KLANSON HEAGEL	175000
2	ottores po Bar han	10000
	- Permap resur de	35000
	Ham by Therap Personal	250 000

a No. 09	15,1101
TY NAMA BARANG	HARGA JUMEAH
PIPA BY PAS	rizoca
Seal court Hop	170000
CU MATIC Sasmon	30000
PICHEKAN DASANG ENLY	10. 1
MALK Transmiss (Terms	HIGAN
MATIC)	12040000
Conti by Pass	360000
Grank Soul Corer	25000
1 Pan har	950,000
Cons Pasane	Shoop

Dengan melihat data jumlah tagihan melebihi jumlah anggaran dimana jumlah anggaran Rp. 177.250.000 sedangkan jumlah tagihan sampai dengan bulan juli 2021 sebanyak Rp. 214.352.000,- atau selisih dengan anggaran sebanyak Rp. 37.102.000, hingga saat ini tidak dapat dilakukan pembayaran disebabkan anggaran tidak mencukupi, karena tidak adanya data digital sehingga data anggaran pada pemeliharaan tidak dapat dikendalikan dengan tepat.





LATAR BELAKANG MASALAH

Adapun Rekapitulasi data kendaraan di Sekretariat DPRD Tahun 2021 adalah Sebagai Berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah	Unit
1	Kendaraan Roda 6	1	Unit
2	Kendaraan Roda 4	23	Unit
3	Kendaraan Roda 2	24	Unit

Data Kendaraan Berdasarkan Tahun Perolehan

No	Jenis kendaraan	Volume	Satuan	Tahun Perolehan
1.	Kendaraan Roda 4	1	unit	2001
2.	Kendaraan Roda 4	1	unit	2005
3.	Kendaraan Roda 4	5	unit	2009
4.	Kendaraan Roda 4	6	unit	2010
5.	Kendaraan Roda 4	2	unit	2011
6.	Kendaraan Roda 4	2	unit	2013
7.	Kendaraan Roda 4	4	unit	2014
8.	Kendaraan Roda 4	1	unit	2018
9.	Kendaraan Roda 4	1	unit	2019
Total		23	Unit	
10.	Kendaraan Roda 6	1	unit	2010
	Total	1	Unit	
11.	Kendaraan Roda 2	1	unit	1993
12.	Kendaraan Roda 2	1	unit	2001
13.	Kendaraan Roda 2	2	unit	2002
14.	Kendaraan Roda 2	1	unit	2007
15.	Kendaraan Roda 2	3	unit	2009
16.	Kendaraan Roda 2	10	unit	2010
17.	Kendaraan Roda 2	2	unit	2013
18.	Kendaraan Roda 2	4	unit	2019
1	Total	24	Unit	

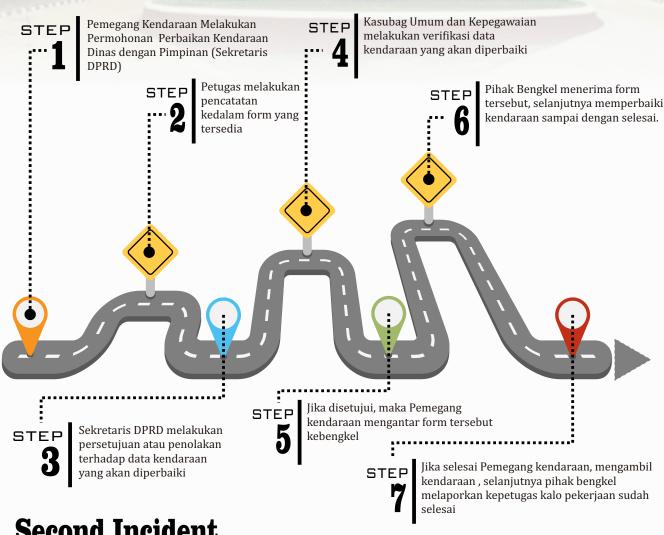




LATAR BELAKANG MASALA

REAL ON THE FIELD

First Incident



Second Incident



Pemegang Kendaraan melakukan perbaikan di bengkel tanpa membawa surat / form pemeliharaan kendaraan, dan pihak bengkel melakukan perbaikan juga tanpa koordinasi dengan petugas atau pimpinan.





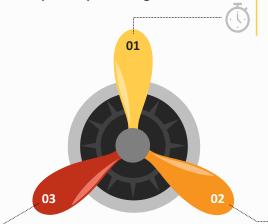
TUJUAN AKSI PERUBAHAN

Untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan pemeliharaan kendaraan dinas dan untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, maka system pemeliharaan kendaraan dinas berbasis elektronik dalam bentuk aplikasi sangat dibutuhkan.

Tujuan Utama yang akan dicapai:

- 1. Mengoptimalkan kinerja pelayanan pemeliharaan kendaraan dinas
- 2. Memberikan kemudahan kepada pemegang kendaraan dinas dalam melaksanakan administrasi pelayanan pemeliharaan
- 3. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Pengelolaan dan Barang Milik Daerah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam aksi perubahan ini dapat digolongkan menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:



Jangka Pendek (Sept-November 2021):

- Tersedianya sarana aplikasi SIPEMDA berbasis Web dan Android
- Tersedianya Sarana Komputer
- Tersedianya SDM sebagai pengguna aplikasi
- Tersedianya SOP

Jangka Panjang (tahun 2023):

 mewujudkan peningkatan pelayanan pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang efisien, efektif, transfaran dan akuntabel

Jangka Menengah (2022):

- Monitoring dan Evaluasi Aplikasi SIPEMDA
- Implementasi Aplikasi
- Integrasi dengan jasa pemeliharaan lainnya





MANFAAT AKSI PERUBAHAN

Dengan terealisasinya pelaksanaan aksi perubahan pelayanan Pemeliharaan Kendaraan yang sebelumnya secara manual (konvensional) dapat ditinggalkan dan beralih menjadi Sistem Informasi Pemeliharaan Kendaraan berbasis elektronik dalam bentuk aplikasi.

Manfaat yang dapat diperoleh

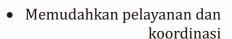
dari aksi perubahan ini adalah:



Manfaat Internal

- Tersedianya database pemeliharaan kendaraan yang akuntabel
- Terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan mudah
- Terwujudnya Standar Operasional Prosedur secara maksimal
- Mengurangi Penggunaan Kertas (Paperless)

Manfaat Eksternal



- Memudahkan Pihak Ketiga (Bengkel)/Penyedia dalam menyediakan jasa pelayanan dan penagihan/invoice
- Mendapatkan kepastian waktu penyelesaian pekerjaan





B. PROFIL KINERJA PELAYANAN

VISI & MISI

Kota Bontang yang mempunyai Visi **Bontang Lebih Hebat dan Beradab**

dengan Misi:

1. Bontang Harmoni

Sinergi dan Kolaborasi antar Pemerintah, Pelaku Usaha/swasta dan masyarakat.

2. Bontang berkelanjutan

Kota layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan, melalui pemanfaatan social budaya, infrastruktur dan pelestarian lingkungan hidup.

3. Bontang berdaya saing dan sejahtera

Bontang adalah sebuah kota diprovinsi Kalimantan Timur, Indonesia Kota ini Terletak sekitar 120 km dari kota Samarinda, berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur diutara dan barat, kabupaten Kutai Kartanegara di selatan dan selat Makassar ditimur.

KOTA BONTANG







BONTANG BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA

MISI

B O N T A N G BERKELANJUTAN **BONTANG HARMONI**





DASAR PEMBENTUKKAN

SEKRETARIAT DPRD



SEKRETARIAT DPRD

Kota Bontang dibentuk berdasarkan:

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya mengalami perubahan

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2
Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5
Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD maka tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD terdapat perubahan menjadi Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.







SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD Kota Bontang pada Perubahan Rencana Strategis menetapkan tujuan yaitu :

"Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD".

Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang dalam melaksanakan trifungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses penetapan produk hukum yang berkualitas dan partisipatif yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat.

Dalam mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan program-program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bontang sebagai berikut:

PROGRAM

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur.
- 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 7. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
- 8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 9. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
- 10. Program Penataan Peraturan Perundang undangan
- 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah

Tugas Sekretariat DPRD:

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi Sekretariat DPRD:

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD melaksanakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

aporan Aksi Parubahan PKP V 2021 "SIDEMDA"

Profil Kinerja Pelayanan



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG





TUPOKSI Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Fungsi:

- Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja Bagian Umum dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian internal kantor sesuai dengan prosedur sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja yang akan datang;
- menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli/teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kegiatan konstruksi
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
- mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan
- membina dan memberikan teguran kepada bawahan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan

- mengelola pengembangan kompetensi pegawai baik secara formal dan nonformal dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- menyusun kebutuhan perlengkapan kantor sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Tugas Pokok:

Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk efektifitas pelaksanaan tugas.

- Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan kendaraan dinas di Sekretariat DPRD sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung sesuai prosedur untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan;
- menyediakan kebutuhan logistik pimpinan, rapat, kegiatan dan tamu DPRD sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas



Profil Kinerja Pelayanan